

POTENSI SUMBERDAYA EKONOMI DAERAH: SEBUAH TINJAUAN ASPEK EKONOMI BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

I Ketut R. Sudiarditha*

ABSTRACT

Potency effort for micro, small and medium-size enterprises in Indonesia very potential to be developed in the effort absorption of labour and at the same time prosperity public. The many small business emerging in when crisis to give indication that Indonesia chartered investment counsel potency still need to be developed furthermore. Its the expansion is till now unable to be pushed by innovation factor and usage of information of technology. Effort for small and medium-size enterprises in Indonesia can be developed in: First, expansion of real soul and entrepreneurs character. Needs more entrepreneurs in Indonesia borne by pushed by vision and innovation. Second, skilled expansion enlarges business; small business activity which there are having to constructed and developed. Third, direction and excellence expansion competes nation. Interaction and the relation of the existing inter-states more influenced by chartered investment counsel factor. Therefore to can become pre-eminent nation and considered, hence Indonesia must soon finds and develops excellence of its the core.

Keywords: *Economic Resources, Micro Small and Medium-size Enterprises.*

PENDAHULUAN

Di tengah kondisi laju perekonomian yang masih lambat ini, ketimpangan wilayah pedesaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan rasio yang signifikan dalam membangun kebersamaan ekonomi nasional. Ketimpangan ekonomi tersebut diakibatkan sumber daya lahan yang mengalami penyusutan, kelangkaan sumber daya alam, sumber air, kedaulatan pangan, dan keseimbangan iklim yang tidak

bisa di pastikan; yang paling nampak adalah semakin bertambahnya kaum miskin pedesaan bahkan termasuk kota-kota besar. Dalam situasi inilah pengembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Argumentasi ekonomi di belakang ini yakin karena UMKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UMKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UMKM

* I Ketut R. Sudiarditha. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

sangat penting perannya, terutama UMKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerakyatan.

Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UMKM dalam sektor ekonomi kerakyatan dapat mengeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya, UMKM yang tergantung pada *input import* mengalami keterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini. Keberadaan UMKM merupakan solusi alternatif terhadap permasalahan ekonomi bangsa, terbukti UMKM telah menyumbangkan sebesar RP. 1.013,5 triliun atau 56,7% dari PDB (www.ktin.org.id), kemudian pada periode sebelum krisis ekonomi, kontribusi UMKM terhadap ekspor berkisar antara 4,6 persen sampai 5,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa keunggulan yang dimiliki UMKM. *Pertama*, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang relatif tahan banting ketimbang kegiatan usaha besar. *Kedua*, peran UMKM dalam penerimaan ekspor nasional cukup penting dan berpotensi untuk ditingkatkan lagi di masa datang. *Ketiga*, pengembangan potensi ekspor UMKM ini dapat membantu meringankan tekanan pada neraca pembayaran internasional sebagai akibat dari besarnya hutang luar negeri. Terlepas dari hal itu besarnya potensi dan kontribusi UMKM dalam peningkatan pembangunan nasional, meski begitu tidak jarang pula masalah yang dihadapi UMKM.

Namun salah satu masalah mendasar yang dihadapi UMKM saat

ini adalah masalah akses pemasaran, sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen pengelolaan, dan yang lebih dominan yaitu akses permodalan. Hal ini semakin terasa di saat UMKM ingin mempertahankan bahkan keinginan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang lebih besar akan terhambat. Apalagi untuk membangun lewat sektor perdagangan.

Hakikat dari pembangunan ekonomi adalah untuk mensejahterakan rakyat, namun rasanya tidak untuk negara kita. Seolah-olah regulasi di bidang perekonomian nasional ditujukan untuk mengejar pertumbuhan angka instrumental semu, tanpa diiringi dengan kenyataan. Lihat saja tingkat kemiskinan yang bertambah menjadi 37 juta (BPS: 2007), pengangguran yang semakin bertambah, infrastruktur yang timpang dan belum memadai, tidak meratanya distribusi pendapatan, dll. Bangsa ini juga masih berkonsentrasi pada spekulasi perdagangan harga saham, yang seharusnya lebih sedikit dari pasar komoditas dan perdagangan internasional. Investasi yang terjadi pun akan menjadi berbahaya dan akan mengakibatkan guncangan badai krisis kedua, karena sifatnya yang *easy come esasy going* secara tiba-tiba.

Transformasi ekonomi harus diarahkan kepada pemberdayaan UMKM sebagai simbol ekonomi kerakyatan. Berpijak pada ekonomi sektor riil, populasi unit usaha UMKM sangat dominan (99,99%) dalam struktur ekonomi nasional. Artinya, akan sangat efektif bila transformasi

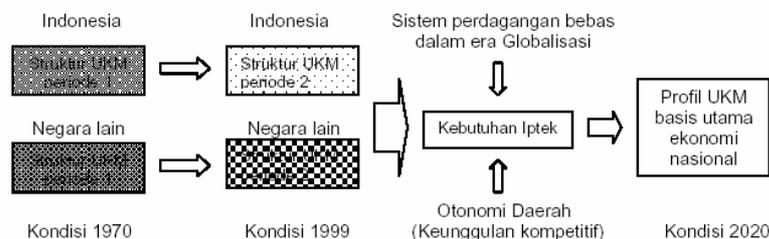
ekonomi didasari atas langkah-langkah pengembangan UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas. Imbas dari itu semua tentunya akan kembali kepada rakyat demi terwujudnya pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.

Kebutuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Teknologi

Memperhatikan sisi permintaan dan potensi sumberdaya serta profil Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) sampai saat ini, dalam 20-25 tahun ke depan diperkirakan akan berkembang tiga kelompok UMKM yang sangat prospektif yaitu: (1) komunikasi, (2) industri obat-obatan, dan (3) industri jasa. Kelompok usaha yang pertama sangat sesuai ditangani oleh UMKM karena berbagai alasan yaitu: (1) pengalaman selama ini menunjukkan bahwa industri komunikasi sangat efisien bila dijalankan oleh usaha skala kecil bahkan tingkat rumah tangga, (2) kecenderungan *miniaturisasi* yang terus berkembang dalam kecenderungan teknologi global.

Di sisi lain, kelompok usaha di bidang obat-obatan akan terus dipicu

oleh meningkatnya kesadaran terhadap jenis obat yang ramah lingkungan di negara-negara maju dan kebutuhan obat-obatan alternatif di dalam negeri. Hal ini didorong oleh mahalnya obat-obatan kimia yang sebagian besar berbahan baku impor. kelompok usaha jasa lainnya seperti akomodasi (*home stay* dan rumah makan) dan transportasi wisata akan terus berkembang pesat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi dalam negeri maupun global seperti inilah dapat diperkirakan akan terjadi perubahan struktur ke depan yang akan didominasi oleh tiga kelompok UMKM di atas. Kecenderungan kebutuhan UMKM terhadap teknologi ke depan tidak dapat terlepas dari perubahan struktur UMKM tersebut. Teknologi yang akan didesain, mulai sekarang harus sudah mempersiapkan permintaan yang sangat substansial dari industri komunikasi, obat-obatan, dan jasa berskala kecil maupun menengah untuk mendukung perkembangan UMKM yang makin prospektif (M. Oka Adnyana Manikmas: 2008) seperti nampak pada Gambar 01 berikut.



Gambar 1. Kerangka Analisis Kebutuhan Teknologi dan Profil UKM ke depan.

Otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2001 yang diberikan kepada wilayah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat yang tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Secara teoritis, ada enam elemen yang menjadi dasar pemerintah daerah yaitu: (1) urusan otonomi yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; (2) Kelembagaan yang merupakan wadah dari otonomi yang diserahkan kepada daerah; (3) Pegawai dan staf yang mempunyai tugas untuk menjalankan otonomi; (4) Sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; (5) Unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; dan (6) Manajemen pelayanan umum sebagai refleksi dari penyelenggaraan otonomi daerah (Swandi, 2001). Keenam elemen tersebut secara integrasi merupakan suatu sistem yang membentuk pemerintah daerah. Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pembentukan *piece-meal* yang selama ini dilakukan selalu menghasilkan *outcomes* yang kurang optimal.

Dalam era otonomi daerah, masing-masing wilayah didorong untuk memanfaatkan keunggulan sumber daya lokal guna meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah

baik pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan paradigma *think locally but action globally*. Usaha kecil menengah yang tumbuh subur di masing-masing wilayah kecuali wilayah Maluku dan Irian Jaya hendaknya memanfaatkan peluang dan momentum dalam era otonomi daerah. Mereka harus terus mengembangkan sayap usahanya di samping mendirikan UMKM-UMKM baru yang berdaya saing tinggi. Ke depan kelompok UMKM yang merupakan sektor ekonomi andalan hendaknya memperhatikan antara lain: (1) Memiliki daya saing tinggi; (2) Berkerakyatan; (3) Dihela oleh ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi; (4) Terdesentralisasi dan menyebar lebih merata pada masing-masing wilayah; (5) Menjadi motor penggerak roda pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian pondasi ekonomi Indonesia akan bertumpu pada usaha mikro kecil menengah tersebut.

Prospek Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada tahun 2006, data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di Indonesia terdapat 48,9 juta usaha kecil dan menengah (UKM), menyerap 80% tenaga kerja serta menyumbang 62% dari PDB (di luar migas). Data tersebut sekilas memberikan gambaran betapa besarnya aktivitas kewirausahaan di Indonesia dan dampaknya bagi kemajuan ekonomi bangsa. Terlebih lagi ditambahkan dengan data hasil penelitian dari *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)* yang

menunjukkan bahwa pada tahun yang sama, di Indonesia terdapat 19,3 % penduduk berusia 18-64 tahun yang terlibat dalam pengembangan bisnis baru (usia bisnis kurang dari 42 bulan). Ini merupakan yang tertinggi kedua di Asia setelah Philipina (20,4%) dan di atas China (16,2) serta Singapura (4,9%).

Namun di sisi lain, data BPS pada tahun yang sama juga menunjukkan masih terdapat 11 juta penduduk Indonesia yang masih menganggur dari 106 juta angkatan kerja, serta 37 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Fakta-fakta tersebut seakan-akan menunjukkan kewirausahaan di Indonesia tidak dapat memberikan sumbangan yang positif bagi kesejahteraan bangsa. Padahal seorang pakar kewirausahaan, David McClelland mengatakan bahwa jika 2% saja penduduk sebuah negara terlibat aktif dalam kewirausahaan, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan sejahtera. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Profesor Edward Lazear dari *Stanford University* yang mengatakan bahwa wirausahawan adalah pelaku paling penting dari kegiatan ekonomi modern saat ini. Apakah ada yang keliru dari data tersebut? Ataukah data tersebut tidak mencerminkan kondisi kegiatan kewirausahaan yang sesungguhnya? Atau semua hal tersebut memang gambaran yang sesungguhnya dan perlu melakukan pembenahan yang lebih serius pada dunia kewira-usahaan di Indonesia.

Kegiatan kewirausahaan di Indonesia berkembang paling pesat

saat krisis moneter; bahkan pada tahun 2001 dari hanya 7000 usaha kecil melesat menjadi 40 juta. Artinya banyak usaha kecil yang muncul di saat krisis tersebut dikarenakan kebutuhan (*necessity*) dan kurang didorong oleh faktor inovasi. Jadi di sinilah sumber daya ekonomi yang potensial sangat diperlukan untuk membangun usaha mikro kecil dan menengah untuk memberikan kesempatan kerja dan sekaligus mensejahterakan rakyat Indonesia.

Jika data BPS tahun 2006 ditelaah lebih lanjut, 48,8 juta usaha kecil di Indonesia tahun 2006 menyerap 80,9 juta angkatan kerja. Berarti setiap usaha tersebut hanya menyediakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri ditambah 1 (satu) orang lain. Sementara itu pada saat yang sama, 106 ribu usaha menengah menyerap 4,5 juta tenaga kerja yang berarti 1 (satu) kegiatan usaha menengah menyerap 42,5 tenaga kerja. Ada kesenjangan yang sangat besar antara jumlah skala usaha kecil dibandingkan usaha menengah serta perbedaan yang sangat signifikan dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja.

Selain itu, usaha kecil di Indonesia didominasi oleh kegiatan yang bergerak pada sektor pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan (53,5%), sementara usaha menengah banyak bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran (53,7%) dan usaha besar di industri pengolahan (35,4%). Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia kewirausahaan di Indonesia memang tertinggal diban-

dingkan negara lain yang sudah memasuki abad informasi dan pengetahuan. Dunia kewirausahaan Indonesia masih banyak yang mengandalkan otot dibandingkan otak, kerja keras dibandingkan kerja cerdas.

Memperhatikan kondisi tersebut sudah seharusnya kewirausahaan di Indonesia perlu dikembangkan yang dapat dilakukan dalam hal: *Pertama*, pengembangan jiwa dan karakter wirausaha sejati. Perlu lebih banyak wirausahawan di Indonesia yang dilahirkan dengan didorong oleh visi dan inovasi dan bukan semata-mata karena keterpaksaan dan hanya menjadikan kegiatan usaha sebagai tempat singgah sementara (sampai mendapatkan pekerjaan). Hal ini menjadi tugas dari dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, karakter dan ketrampilan kreatif serta sikap mandiri dan pro-aktif harus mewarnai semua kegiatan pembelajaran. *Kedua*, pengembangan ketrampilan membesarkan usaha. Kegiatan usaha kecil yang sudah ada harus dibina dan dikembangkan. Jika 50% saja kegiatan usaha kecil di Indonesia berkembang dan membutuhkan tambahan 1 (satu) orang tenaga kerja, maka akan tersedia 24,4 juta lapangan kerja baru; di saat seperti itu mungkin harus mulai mengimpor tenaga kerja asing. Hal ini dapat diupayakan dengan mengembangkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan dunia pendidikan. Ketrampilan mengembangkan usaha tersebut meliputi ketrampilan berinovasi dan manajerial yang bersifat strategis. Oleh karena itu UMKM tidak

dibesarkan dengan semata-mata suntikan hormon (dana). *Ketiga*, arah dan pengembangan keunggulan bersaing bangsa. Negara China bekerja keras mengembangkan infrastruktur fisik untuk meningkatkan daya saing barang-barang hasil produksinya. Negara India meningkatkan infrastruktur dan *brainware* teknologi informasi untuk dapat bersaing di dunia IT. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Sudah merupakan hal yang nyata, bahwa interaksi dan hubungan antar negara saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Perilaku negara sudah menjadi seperti perilaku perusahaan besar yang bersaing satu sama lain. Oleh karena itu agar dapat menjadi bangsa yang unggul dan diperhitungkan, maka Indonesia harus segera menemukan dan mengembangkan keunggulan intinya. Setelah itu pemerintah harus mengarahkan dunia kewirausahaan untuk bergerak dan menunjang keunggulan bersaing bangsa tersebut. Dengan demikian, maka kita kelak akan melihat negara Indonesia menjadi semacam perusahaan raksasa yang menaungi puluhan juta wirausahawan sejati.

PENUTUP

Keberhasilan daerah dalam mengelola bisnis dapat tumbuh dan berkembang akan ditentukan oleh kepemimpinan yang selalu siap mempengaruhi orang lain dalam mengilhami wawasan dan imajinasi sebagai pondasi dalam menggerakkan daya kemauan. Dengan demikian untuk menjadi usaha mikro kecil dan menengah sejati harus mampu

menggerakkan kepentingan akan sadar kemauan sebagai sesuatu yang timbul dari dalam diri sendiri bukan sesuatu yang dipaksakan.

Kebersamaan wawasan dan imajinasi diharapkan dapat menuntun kerjasama membuat impian menjadi kenyataan melalui kemauan dan kebiasaan menggerakkan alat kekuatan pikiran berupa kesadaran, kecerdasan dan akal. Dalam usaha mewujudkan komitmen atas idenfikasi dari hasil pemikiran visi hidup masa depan untuk menyatukan pikiran dengan identifikasi peluang bisnis. Sebagai sarana untuk memberikan cetusan gagasan menuju ke jalan harapan masa depan haruslah memiliki daya dorong untuk memperkuat daya kemauan itu sendiri melalui pemahaman atas kekuatan pikiran yang disebut dengan kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan mengajak dalam memikirkan untuk mencapai potensi diri sepenuhnya melalui pengalaman sendiri dan atau berkaca dari pengalaman orang lain dalam usaha memilih cetusan hati untuk memilih pemikiran-pemikiran yang menciptakan keadaan dan keadaan itulah yang akan membentuk kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik (BPS). 2006, 2007.
- Curry, Admund Jeffrey. 2001. *Memahami Ekonomi Internasional*. Jakarta: Word Trade Press.
- Effendi, Sofyan, Mubyarto. 2005. *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM.
- M. Oka Adnyana Manikmas. 2008. *Potensi Pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam Era Otonomi Daerah*.
- Rahardjo, Dawan. 2006. *Menuju Indonesia Sejahtera: Solusi Konkret Pengetasan Kemiskinan*. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rachbini, Didik. J. 2001. *Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rustiadi, Ernan, dkk. 2008. *Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pada Kawasan Pedesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Sri-Edi Swasono. 2005. *Ekspose Ekonomika*. Pusat Studi Ekonomi Pancalisa-UGM: Jakarta.
- Suwandi, M. 2001. *Implikasi Penyerahan BPTP Kepada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Makalah disampaikan pada Raker Badan Litbang Pertanian 28-29 Nopember 2001.
- Soetrisno, Noer., Manggara Tambunan., Ubaidilah., dkk. 2003. *Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, TH, Tulus. 2001. *Transformasi Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.ktin.org.